

Jokowi Minta Sinergitas KY dan MA Diperkuat untuk Jaga Martabat Hakim

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan peran Komisi Yudisial (KY) sangat penting dalam reformasi peradilan.

Jokowi mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutannya saat acara Laporan Tahunan KY 2022.

“Peran Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan sangat penting untuk melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen. Agar kekuasaan kehakiman mengedepankan akuntabilitas peradilan,” kata Jokowi dalam sambutannya, yang disiarkan YouTube KY, Senin (13/3).

Sebagai mitra Mahkamah Agung (MA), Jokowi meminta KY terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. “Dan menjawab rasa keadilan masyarakat pemerintah mendukung setiap langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan,” ucap Jokowi.

Jokowi juga meminta KY aktif mencatat keluhan-keluhan masyarakat dan para pencari keadilan. Selain itu, KY diminta melakukan langkah-langkah konkrit untuk menjaga rasa keadilan.

Jokowimenyebut peran Komisi Yudisial

(KY) dalam reformasi peradilan sangat penting, terutama dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja hakim.

“Fungsi pengawasan internal yang independen agar kekuasaan kehakiman mengedepankan akuntabilitas peradilan sebagai mitra Mahkamah Agung,” ujarnya.

Kepala Negara meminta KY terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab rasa keadilan masyarakat.

“Pemerintah mendukung setiap langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan,” ucapnya.

Sinergitas KY dan MA perlu terus diperkuat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim yang menjadi bagian penting untuk mencapai Indonesia maju.

“Kita harus mencatat keluhan masyarakat dan para pencari keadilan serta melakukan langkah-langkah konkrit untuk menjawab rasa keadilan,” ujarnya.

Jokowi berterima kasih kepada KY yang telah bekerja keras dalam menjaga marwah dunia peradilan serta menyampaikan laporan akhir tahun secara terbuka di publik. ● han

Putusan PN Jakpus Belum Final dan Tak Pengaruhi Tahapan Pemilu

JAKARTA (IM) – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat gaduh.

Hal itu dikarenakan ada masalah administratif yang dilakukan oleh KPU terhadap Partai PRIMA. Akibatnya, KPU dijatuhi hukuman untuk menunda Pemilu 2024.

Selain itu, KPU juga dihukum untuk mengulang tahapan Pemilu dari awal. Lantaran hal tersebut, ditakutkan keputusan PN Jakarta Pusat akan berdampak kepada KPU dan Partai Politik, serta menghambat jalannya Pemilu 2024.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio memberikan tanggapan mengenai dampak keputusan PN Jakarta terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Partai Politik sebagai peserta.

“Tidak perlu ada dampak. Yang pertama, keputusannya belum inkrah, dan yang kedua, tahapan Pemilu masih berjalan,” ujar Hendri Satrio kepada wartawan.

Setelah menerima hasil putusan dari PN Jakarta Pusat, KPU dengan sigap langsung bertindak untuk mengajukan banding.

Hendri Satrio menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 harus tetap dijalankan oleh KPU, sambil menunggu inkrah.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga memaparkan bahwa seharusnya para Capres dan Partai Politik tidak terdampak oleh keputusan tersebut.

“Mereka seharusnya hanya melihat hal itu sebagai kerikil kecil saja dalam perjalanan demokrasi, dan tidak perlu dianggap berlebihan,” ujarnya dalam menanggapi dampak keputusan PN Jakarta Pusat terhadap partai politik sebagai peserta Pemilu. ● han

Sepanjang 2022, KY Terima 2.925 Laporan Masyarakat

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Yudisial (KY), Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, pihaknya telah menerima 2.925 laporan masyarakat sepanjang 2022. Hal tersebut disampaikan Mukti Fajar dalam penyampaian laporan tahunan KY tahun 2022 yang disiarkan secara daring, Senin (13/3).

“Pada bidang pengawasan hakim dan pemantauan sepanjang tahun 2022 telah menerima laporan masyarakat sebanyak 2.925 laporan,” katanya.

Mukti menambahkan, 2.925 terdiri dari 1.662 laporan masyarakat baik yang disampaikan lang-

sung ke KY melalui kantor penghubung atau melalui pos website dan informasi. Selain itu, 1.263 laporan lainnya merupakan surat tembusan.

Ribuan laporan tersebut banyak didominasi jenis laporan perkara pidana dan perdata. Di mana, sekitar 428 laporan pidana dan 853 laporan perdata.

“Sedangkan dari wilayah provinsi, ada tiga provinsi tertinggi yang menyampaikan laporan kepada Komisi Yudisial yaitu DKI Jakarta Jawa Timur dan Sumatera Utara,” ujarnya.

Selain itu, KY juga turut melakukan kegiatan pemantauan persidangan. Pada 2022, KY telah menerima surat permohonan bantuan persidangan sebanyak 573 kasus yang terbagi menjadi dua bagian utama yakni berdasarkan permohonan masyarakat sebanyak 458 permohonan dan berdasarkan inisiatif KY 151 permohonan.

“Termasuk di antaranya adalah kasus-kasus yang menjadi perhatian publik,” ujarnya. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PERKEMBANGAN KASUS DUGAAN KORUPSI BTS

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi berbicara dalam konferensi pers terkait perkembangan kasus dugaan korupsi BTS di Gedung Puspenkum Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/3). Kejaksaan Agung akan kembali memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada 15 Maret 2023 untuk melakukan pendalaman dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) periode 2020-2022.

KPK Bidik Rafael Alun soal Temuan Deposit Safe Box Berisi Rp37 Miliar

Saat ini KPK sedang menyelidiki unsur pidana terkait ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dengan berkoordinasi dengan PPAK.

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta penjelasan mantan Pejabat Direktorat Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT), ayah tersangka penganiayaan Mario Dandy, soal temuan deposit safe box berisi uang puluhan miliar rupiah.

“Ya dan seluruh proses-proses klarifikasi masih terus akan dilakukan KPK. Kami sedang bekerja.Termasuk koordinasi dengan lembaga lain,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi soal temuan deposit safe

box milik RAT, Senin (13/3).

Saat ini penyidik sedang menyelidiki unsur pidana terkait ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Salah satunya, berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dalam rangka pengumpulan bahan keterangan sehingga bisa mengungkap apakah ada indikasi pidana yang menjadi kewenangan KPK,” terangnya.

Namun Ali belum bisa membeberkan secara detail substansi data-data dan bahan yang telah dikantongi KPK.

Sebab, ketidakwajaran harta kekayaan RAT sudah masuk tahap penyelidikan.

“Karena kami penegak hukum, tentu itu merupakan bagian strategi dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus.Sejatinya demikialah cara bekerjanya hukum. Senyap, tak usah diobrol-obrol ke publik,” ucapnya.

“Apalagi, data intelijen seperti laporan hasil analisis PPAK, itu bahan data informasi intelijen keuangan, bukan bukti hukum. Sudah seharusnya langsung tindak lanjut PPAK serahkan ke aparat penegak hukum bukan sebagai bahan konsumsi di ruang publik,” kata Ali.

Sebelumnya, PPAK menemukan deposit safe box milik Rafael Alun Trisambodo di salah satu bank milik negara. Deposit safe box tersebut berisi mata uang asing yang jumlah

setara Rp37 miliar.

Kepala PPAK, Ivan Yustiavandana menyebut telah memblokir deposit safe box berisi uang puluhan miliar tersebut. Ivan menduga uang puluhan miliar yang berada di deposit safe box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut merupakan hasil suap.

Rafael Alun Trisambodo sendiri sebelumnya sudah sempat diklarifikasi oleh tim Kedepuitan Pencegahan KPK soal harta kekayaannya. Rafael diklarifikasi KPK karena mempunyai harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Tak hanya itu, PPAK juga menemukan ada indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. PPAK menyebut ada peran konsul-

tan pajak sebagai pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola uang Rafael Alun.

Temuan PPAK serta KPK tersebut saat ini sedang dicari unsur pidananya. KPK telah meningkatkan status temuan ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun ke tingkat penyelidikan. KPK sedang menyelidiki dan mencari unsur pidana suap dan gratifikasi terkait Rafael Alun Trisambodo.

Temuan ketidakwajaran harta Rafael Alun Trisambodo buntut dari kasus anaknya, Mario Dandy Satriyo. Mario Dandy merupakan pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, anak petinggi Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Jonathan Latumahina. Mario telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan tersebut. ● mar

KPK Kantongi Bukti Aliran Dana Pengurusan Perkara untuk Sekretaris MA

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi bukti adanya aliran dana terkait dugaan suap pengurusan perkara untuk Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan. Bukti tersebut pernah diungkap dalam persidangan kasus suap pengurusan perkara MA.

“Benar, kalau kita ikuti dari fakta sidang sejauh ini ada petunjuk dugaan tersebut,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (13/3).

Dugaan aliran dana tersebut telah dikonfirmasi penyidik KPK kepada Hasbi Hasan pada Kamis (9/3) lalu. Saat itu, Hasbi Hasan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA untuk tersangka Gazalba Saleh (GS).

Hasbi Hasan didalami pengakuannya soal penanganan perkara di MA. Se-

lain itu, penyidik KPK juga menggali keterangan Hasbi Hasan soal aliran uang pengurusan perkara dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka melalui perantara Pengacara, Yosep Parera.

“Hasbi Hasan (Sekretaris MA RI), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penanganan perkara di MA.Termasuk didalami kembali dugaan adanya aliran uang ke beberapa pihak terkait dalam pengurusan perkara Heriyanto Tanaka melalui perantara Yosep Parera,” kata Ali, Jumat (10/3) lalu.

Nama Hasbi Hasan sempat muncul dalam dakwaan perkara suap pengurusan perkara kasasi di MA. Ia diduga sempat bertemu dengan pengacara yang menggugat kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Theodoros Yosep Parera dan Eko Suparno.

Hasbi Hasan dikenal ke Theodoros Yosep Parera dan Eko Suparno lewat Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Dadan disebut dalam dakwaan perkara ini telah menerima Rp11,2 miliar dari Theodoros Yosep dan Eko Suparno. Uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara di MA.

“KPK dalam terkait aliran uang tersebut. Yang dari fakta persidangan perkara ini ternyata terbelang jumlahnya besar. Bila ditemukan alat bukti cukup, siapapun pasti akan kembali KPK tetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ucap Ali.

KPK sedang mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pengurusan perkara di MA. Diduga, tak sedikit pihak yang memberi maupun menerima suap terkait pengurusan perkara di MA.

Dalam pengembangan

perkara tersebut, KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian telah mencegah dua orang untuk bepergian ke luar negeri. Keduanya adalah penyanyi Windy Yunita Ghemary dan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 13 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Mereka yakni, dua Hakim Agung, Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh. Kemudian, dua Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti, Elly Tri Pangestu dan Prasetyo Nugroho.

Selanjutnya, Staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza (RN); empat PNS MA, Desy Yustria (DY), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albasri (AB).

Lantas, dua Pengacara, Theodoros Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam

Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam perkara ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, Gazalba, Prasetyo, dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. KPK sedang mendalami lebih detail rincian uang suap yang diterima para pegawai dan Hakim MA. ● mei

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pemegang Saham Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LLOYD PHARMA INDONESIA (“Perseroan”) tanggal 10 Maret 2023 telah memutuskan Perseroan untuk menurunkan (Pengurangan) Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Diempatkan dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus menjadi hutang kepada para pemegang saham sehingga Modal Dasar Perseroan berubah menjadi berjumlah Rp. 53.877.000.000,00 (limapuluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 53.877 (limapuluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Modal Diempatkan berubah menjadi sejumlah 53.877 (limapuluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta) saham dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 53.877.000.000,00 (limapuluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah).
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 44 ayat 2 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Demikian agar diketahui.
Kota Tangerang, 14 Maret 2023
Direksi Perseroan



PENDIDIKAN POLITIK POLITISI MUDA PARTAI GOLKAR

Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Ridwan Kamil menyampaikan paparannya dalam acara Kuliah Umum Partai Golkar di Golkar Institute, Jakarta, Senin (13/3). Kuliah umum yang dihadiri para politisi muda partai Golkar tersebut bertemakan Kepemimpinan Transformatif yang Berbasis Karya.

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 31 Maret 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu AW Syahrani

Jalan AW Syahrani RT 24 Samarinda

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin
Kantor Cabang Samarinda (0541) 752050

Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin